

**STUDI MASALAH REKONSTRUKSI INFRASTRUKTUR  
PASCA BENCANA ALAM  
(Studi Kasus Rekonstruksi Perumahan Bantuan BRR  
di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan  
Program Strata-1 pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik  
Universitas Andalas Padang*

*Oleh*

**WILMAN ISNAINI**

**02 172 080**

*Pembimbing :*

**Dr. Ir. AKHMAD SURAJI**

**TAUFIKA OPHIYANDRI, MSc**



**JURUSAN TEKNIK SIPIL – FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2007**

## ABSTRAK

Bencana dapat meluluhlantakan infrastruktur termasuk perumahan dan pemukiman. Rekonstruksi pasca-bencana adalah tindakan yang dilakukan untuk membangun kembali suatu komunitas setelah satu periode rehabilitasi akibat suatu bencana dengan tindakan-tindakan mencakup pembangunan rumah permanen, pemulihan semua pelayanan secara penuh, dan memulai kembali secara tuntas dari keadaan sebelum bencana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan masalah-masalah rekonstruksi infrastruktur pada kasus rekonstruksi perumahan akibat bencana alam. Penelitian ini dilakukan dengan cara interview terstruktur pada pihak-pihak yang terlibat dalam rekonstruksi perumahan bantuan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) di Kota Banda Aceh yaitu BRR, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), konsultan dan kontraktor, serta masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah rekonstruksi yang sering terjadi yaitu masalah pada tahap pelaksanaan. Isu utama permasalahan terjadi pada koordinasi internal dan eksternal BRR, strategi manajemen konstruksi, kontraktor, dan dari masyarakat.

Penanggulangan yang telah dilakukan dengan meningkatkan koordinasi, merubah struktur BRR, merubah strategi manajemen konstruksi, meningkatkan monitoring, sampai melakukan pendekatan-pendekatan intensif baik sosial maupun hukum kepada masyarakat korban bencana. Akan tetapi penanggulangan tersebut belum dapat mengeliminasi seluruh permasalahan yang terjadi, yang ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah rumah yang selesai dibangun dibandingkan dengan yang ditargetkan oleh BRR.

**Kata Kunci** : Masalah, Rekonstruksi, Infrastruktur

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bencana alam gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 pada pukul 07.58 WIB yang terjadi di wilayah pesisir Nanggroe Aceh Darussalam & Sumatera Utara telah menghancurkan kota Banda Aceh, kota Meulaboh, wilayah pantai Aceh Besar, Aceh Jaya, Nagan Raya, Simeuleue, Aceh Utara, dan Aceh Timur dan 8 kab/kota lainnya di NAD dan Kab Nias di Sumut. Wilayah yang rusak mencapai  $\pm 10.000 \text{ km}^2$  di 22 kab/kota (Pemprov NAD, 2005).

Gempa (8,9 skala Richter) dan tsunami tersebut merupakan yang terbesar keempat setelah yang terjadi pada Tahun 1900. Gempa yang terjadi di pesisir Nanggroe Aceh Darussalam & Sumatera Utara merupakan yang terbesar setelah gempa di Prince William Sound, Alaska (1964) (Pemprov NAD, 2005).

Berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh dari Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) pada tanggal 21 Maret 2005 jumlah korban dari 20 kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diperkirakan mencapai 126.602 meninggal dunia dan telah dimakamkan, serta hilang sebanyak 93.638 orang. Dari sumber informasi yang sama, jumlah pengungsi yang tersebar sebanyak 514.150 jiwa di 21 kabupaten/kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Rencana Induk-Lampiran Perpres No. 30, 2005).

Kerugian bukan hanya pada jiwa, tetapi juga kerusakan yang parah pada infrastruktur. Berdasarkan perhitungan, kerusakan tersebut ditaksir sebesar 4,5 billion USD atau sekitar 41,4 triliun Rupiah.



Kerusakan infrastruktur tersebut meliputi 1,3 juta rumah dan bangunan, 8 pelabuhan, 4 depot BBM, 85% sarana air bersih, 92% sarana sanitasi, 120 km jalan, 18 jembatan, 20% jaringan distribusi listrik (Rencana Induk-Lampiran Perpres No. 30, 2005).

Dalam proses penanggulangan bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, perlu penanganan secara khusus, terencana, terpadu, dan sistematis serta menyeluruh melalui kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pemerintah Indonesia membentuk suatu badan yang khusus menangani rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami yaitu BRR NAD-Nias (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias) yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami tersebut (Perpres No. 30, 2005)

Pembentukan BRR NAD-Nias diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Diperkuat dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005.

Salah satu tugas BRR NAD-Nias adalah melakukan rekonstruksi infrastruktur yang hancur. Seperti yang dikatakan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Meneg PPN/Kepala Bappenas) Sri Mulyani, 50 persen dari total dana rekonstruksi dan rehabilitasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam digunakan untuk pembangunan infrastruktur di provinsi itu. Total dana tersebut besarnya sekitar Rp 45 triliun untuk lima tahun. Pembangunan infrastruktur tersebut, jelas Sri Mulyani, meliputi pembangunan pemukiman, jalan, listrik, alat-alat komunikasi, air bersih, irigasi, pelabuhan laut, serta pelabuhan udara (Kompas, 2005).

Pelimpahan wewenang ini mengakibatkan perubahan-perubahan pengelolaan infrastruktur baik secara implisit maupun eksplisit. Perubahan-perubahan terjadi mulai dari perubahan perundangan, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai ke operasi dan pemeliharaan sistem infrastruktur (Kodoatie, 2005).

Rekonstruksi infrastruktur yang dilakukan memerlukan suatu pengaturan yang sedemikian rupa sehingga proses rekonstruksi dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Master Plan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Manajemen Proyek Infrastruktur adalah seluruh proses manajemen yang dilakukan pada setiap tahapan kegiatan proyek agar bangunan infrastruktur dapat diselesaikan sesuai persyaratan, yaitu: (a) sesuai dengan kualitas yang telah disyaratkan; (b) sesuai dengan anggaran biaya yang disediakan; (c) sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan (Soekirno, 2005).

Mesti demikian kendala/masalah rekonstruksi infrastruktur masih tetap terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, oleh karena itu penelitian ini akan memberikan gambaran terhadap masalah-masalah rekonstruksi infrastruktur tersebut khususnya pada rekonstruksi infrastruktur perumahan di Kota Banda Aceh.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

1. Secara umum proses Rekonstruksi Perumahan Bantuan BRR di Kota Banda Aceh terus berjalan meskipun mengalami masalah hampir disegala aspek, mulai dari aspek manajemen, koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan
2. Permasalahan yang sering terjadi pada Rekonstruksi Perumahan Bantuan BRR adalah pada tahapan pelaksanaan proyek yang disebabkan oleh faktor BRR yaitu masalah koordinasi baik internal maupun eksternal, pihak kontraktor adalah minimnya pengalaman manajemen konstruksi dan masalah keuangan, dan pihak masyarakat/korban bencana itu sendiri yaitu mendapatkan rumah bantuan lebih dari satu unit
3. Penanggulangan masalah yang telah dilakukan mulai dari meningkatkan koordinasi, perubahan struktur BRR, perubahan strategi manajemen konstruksi, meningkatkan monitoring, sampai pendekatan-pendekatan intensif baik sosial maupun hukum kepada masyarakat korban bencana ternyata belum dapat meminimalisir masalah-masalah yang terjadi terbukti dengan sedikitnya jumlah rumah yang telah selesai dibangun dibandingkan dengan jumlah rumah yang ditargetkan oleh BRR

#### **6.2 Saran**

1. Diharapkan pemerintah dapat lebih menyempurnakan pedoman dan panduan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Grigg, Neil, *Infrastructure Engineering and Management*, John Wiley & Sons, 1988.
2. Hudson, W.R., Ralph Haas, Waheed Uddin, *Infrastructure Management*, McGraw-Hill, United State Of America, 1997.
3. ILO, Makalah, *Strategi Dan Respon ILO Yang Terintegrasi Untuk kemanusiaan Dan Rekonstruksi*, Bangkok, 2005. (online: [http://www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/download/0405\\_integrated.pdf](http://www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/download/0405_integrated.pdf) akses 10 Maret 2007)]
4. Inter-Agency Emergency Preparedness Council, Modul, *A Strategy For Recovery And Reconstruction*, Inggris, 1999 (online: [http://www.pep.bc.ca/management/recovery\\_strategy.pdf](http://www.pep.bc.ca/management/recovery_strategy.pdf) akses 10 Maret 2007)
5. KKPPI, Makalah, *Langkah-langkah untuk Mencegah Krisis Infrastruktur di Indonesia*, 2003.(online: [http://www.worldbank.org/eap/eap.nsf/Attachments/\\$File/nfras\\_indo.doc](http://www.worldbank.org/eap/eap.nsf/Attachments/$File/nfras_indo.doc) 22 Februari 2007)
6. Kodoatie, Robert J., *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
7. Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (online: <http://acehmediacenter.or.id/datacenter/upload/Buku-.pdf> akses 18 Desember 2006)
8. Mulyani, Sri, *Pembangunan Infrastruktur di Aceh Sedot Dana Terbesar*, Jakarta, 2005. (online: <http://www.kompascybermedia.com/updated/> 27 November 2006)
9. Multi Donor Fund, *Multi Donor Fund dan BRR umumkan tahap baru dalam rekonstruksi Sebuah strategi untuk fasilitasi infrastruktur senilai US\$1 milyar*, Jakarta, 2006 (online: <http://www.multidonorfund.org/documents/press-release/.doc> 22 Februari 2007)
10. Pemerintah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, *Penyusunan Blue Print Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh*, Banda Aceh, 2005. (online: <http://www.nad.go.id/> akses 27 November 2006)